



MEMBANGUN DEMOKRASI INDONESIA YANG BERLANDASKAN PANCASILA DI ERA DIGITAL

BUILDING INDONESIAN DEMOCRACY BASED ON PANCASILA IN THE DIGITAL ERA

**Waliyul Maulana Siregar¹, Delvita Ayu², Herviana³, Indah Permata Sari Rambe⁴,
Nurkholizah⁵, Pardomuan Tanjung⁶, Raisty Khaitami⁷, Shyaillah Fadillah⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : waliulms@unimed.ac.id¹, delvitaayu048@gmail.com², hervianavina32@gmail.com³,
indahpermatasari48@gmail.com⁴, Kholizahnur49@gmail.com⁵, Pardomuantanjung55@gmail.com⁶,
raistykhaitemi15@gmail.com⁷, shyaillahfadillah04@gmail.com⁸

Article history :

Received : 25-11-2024

Revised : 26-11-2024

Accepted : 28-11-2024

Published: 30-11-2024

Abstract

The aim of this research is to build Indonesian democracy based on Pancasila with a focus on the digital era. The approach used in this research is a descriptive analysis approach with qualitative methods. Data collection techniques in this research used interviews, observation and documentation studies of the required data sources. The research results prove that Indonesian democracy in the digital era is complex in development. The biggest challenge is that hoaxes and manipulation of information threaten the integrity of democracy. This finding is in line with previous research which shows low digital literacy in Indonesia. Critical abilities in processing information are the key to overcoming this challenge. However, Maulida's policy suggestions for increasing public trust in digital elections are in line with global efforts to increase transparency and accountability in the digital democratic process. Increasing digital literacy and strict law enforcement are crucial.

Keyword : Indonesian Democracy, Pancasila, Digital Era.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membangun demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan focus pada era digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap sumber-sumber data yang diperlukan. Hasil penelitian membuktikan bahwa demokrasi Indonesia di era digital kompleksitas perkembangan. Tantangan terbesar adalah hoaks dan manipulasi informasi mengancam integritas demokrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan rendahnya literasi digital di Indonesia. Kemampuan kritis dalam mengolah informasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Namun, Saran kebijakan Maulida untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu digital selaras dengan upaya global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi digital. Peningkatan literasi digital dan penegakan hukum yang tegas menjadi krusial.

Kata Kunci : Demokrasi Indonesia, Pancasila, Era Digital.



PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945. Pancasila tidak hanya menjadi sebuah lima dasar ideologi negara yang harus dihafalkan oleh rakyat Indonesia tetapi juga harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila merupakan sebuah cakupan representative dari nilai-nilai luhur yang menjadi identitas asli bangsa Indonesia (Mudrikah Afra,et al., 2024).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era digital yang semakin canggih, tantangan dan peluang pun muncul seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Generasi muda menghadapi perubahan perilaku dan nilai akibat pengaruh budaya digital global. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Pancasila dapat tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Sebagai tempat lahirnya Indonesia, Pancasila telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transformasi nilai-nilai Pancasila dilakukan untuk memastikan generasi muda Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kebangsaan di era digital yang semakin canggih (Ramadhani Afra,et al.,2024).

Di era transformasi digital yang terus berkembang, pentingnya menghayati nilai-nilai Pancasila menjadi landasan terpenting dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia. Meskipun teknologi membawa berbagai manfaat dengan mempermudah akses terhadap informasi, masyarakat masih menghadapi tantangan besar dalam menyaring informasi yang akurat, dan dampak teknologi dan digital telah menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya Indonesia yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau perubahan yang merugikan.

dan moralitas yang berpotensi membahayakan.

Demokrasi berasal dari dua kata yang terbentuk, yakni demos yang artinya rakyat dan kratein/kratein yang artinya kedulatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, masyarakat atau komunitas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi digital merupakan sebuah konsep yang dapat menumbuhkan deliberasi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam suatu tata kelola pemerintahan.

Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila diartikan sebagai demokrasi yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Secara umum demokrasi Pancasila adalah ideologi demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Konsep pengertian demokrasi Pancasila jelas bersumber dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Digitalisasi adalah proses pengubahan analog menjadi digital dengan menggunakan teknologi digital dan data melalui sistem operasi otomatis dan sistem komputerisasi. Digitalisasi adalah perubahan informasi atau data analog menjadi format digital yang dapat diakses dan diolah komputer. Proses ini mencakup konversi dokumen, gambar, suara, dan data lain, serta perubahan cara berinteraksi, berorganisasi, dan bahkan berpolitik, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas (Mudrikah Afra,et al.2024).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana membangun demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menjelaskan fakta – fakta yang ditemukan dan menghasilkan data deskriptif antara berbagai elemen yang terlibat. Dalam metode ini , penulis juga menggunakan pendekatan study literatur atau pendekatan kajian Pustaka yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber seperti buku, media dan jurnal- jurnal yang relevan yang terkait dengan demokrasi Pancasila di era digital (Mudrikah,et al.,2024). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap sumber-sumber data yang diperlukan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam membangun demokrasi Indonesia yang berlandaskan pancasila di era digital.

Wawancara dilakukan dengan satu narasumber, yaitu Maulida Annasya Hafiz, mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala. Wawancara difokuskan pada pemahaman narasumber tentang perkembangan demokrasi di Indonesia di era digital, khususnya peran media sosial dan tantangan bagi generasi muda.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara meliputi:

1. Bagaimana Anda melihat perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, terutama dengan pesatnya penggunaan media sosial?
2. Sebagai generasi muda, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam memahami dan menjalankan demokrasi di era digital?
3. Seberapa besar peran media sosial dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat menurut Anda?
4. Bagaimana menurut Anda Demokrasi Pancasila dapat mencegah konflik kepentingan antar-warga negara?
5. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan demokrasi?
6. Jika Anda menjadi pengambil kebijakan, apa yang akan Anda prioritaskan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu digital?
7. Apa pendapat Anda tentang peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa temuan penting terkait perkembangan demokrasi di Indonesia di era digital, khususnya peran media sosial dan tantangan bagi generasi muda, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkembangan Demokrasi dan Peran Media Sosial: Wawancara dengan Maulida Annasya Hafiz (mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala) mengungkapkan pandangan yang kompleks tentang perkembangan demokrasi Indonesia di era digital. Ia mengakui peran media sosial dalam memperluas akses informasi dan partisipasi politik, mewujudkan kesetaraan akses



- bagi warga negara dalam kehidupan politik. Namun, Maulida juga menyoroti tantangan serius berupa penyebaran hoaks dan manipulasi digital yang mengancam integritas demokrasi. Ia menekankan pentingnya literasi digital untuk menyaring informasi yang valid.
2. Tantangan Generasi Muda: Maulida mengidentifikasi kesulitan memilah informasi benar dan hoaks sebagai tantangan utama bagi generasi muda dalam memahami demokrasi digital. Banyaknya informasi yang beredar membuat proses verifikasi kebenaran informasi menjadi sulit dan memakan waktu, meningkatkan kerentanan terhadap informasi yang menyesatkan.
 3. Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik dan Partisipasi Politik: Maulida mengakui peran besar media sosial dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik. Kemudahan akses informasi politik memudahkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan dan membentuk opini, namun juga berpotensi disalahgunakan untuk manipulasi opini dan polarisasi.
 4. Demokrasi Pancasila dalam Mencegah Konflik Kepentingan: Maulida berpendapat bahwa nilai-nilai Demokrasi Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan) berpotensi mencegah konflik kepentingan. Musyawarah mufakat dan keadilan diharapkan menghasilkan keputusan yang mengakomodasi semua pihak. Namun, implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi tantangan di era digital yang ditandai polarisasi dan informasi yang tidak akurat.
 5. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Maulida menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan, keadilan, dan musyawarah mufakat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan demokratis.
 6. Prioritas Kebijakan untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemilu Digital: Sebagai pengambil kebijakan, Maulida memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu digital, penguatan pengawasan kampanye digital, peningkatan literasi digital, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum di dunia digital. Ia juga menyoroti pentingnya mengurangi biaya politik dan meningkatkan kesadaran hukum. Upaya memperkuat kohesi sosial dan mengurangi politik identitas juga dianggap penting.
 7. Peran Generasi Muda: Maulida menekankan peran penting generasi muda dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila. Ia mengharapkan generasi muda memiliki nasionalisme yang kuat, cinta budaya bangsa, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Penguasaan literasi digital dan berpikir kritis sangat penting agar generasi muda dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Maulida mengonfirmasi kompleksitas perkembangan demokrasi Indonesia di era digital. Meskipun media sosial memperluas akses informasi dan partisipasi, tantangan berupa hoaks dan manipulasi informasi mengancam integritas demokrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan rendahnya literasi digital di Indonesia. Kemampuan kritis dalam mengolah informasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Pandangan Maulida tentang peran Demokrasi Pancasila dalam mencegah konflik kepentingan menunjukkan harapan akan nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Namun, implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi hambatan. Polarisasi dan penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial memperumit upaya membangun konsensus dan keadilan.



Saran kebijakan Maulida untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu digital selaras dengan upaya global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi digital. Peningkatan literasi digital dan penegakan hukum yang tegas menjadi krusial. Peran generasi muda sebagai agen perubahan sangat penting dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan berlandaskan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif perlu menekankan literasi media dan partisipasi demokratis yang bertanggung jawab.

Pembahasan

Demokrasi berasal dari gabungan dua kata: *demo* yang berarti “rakyat” dan *kratos/kratein* yang berarti “memerintah” atau “memerintah”. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada partisipasi rakyat, oleh rakyat, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem demokrasi, rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Konsep demokrasi selalu erat kaitannya dengan konsep negara. Demokrasi memerlukan undang-undang untuk mengatur negara. Pancasila kini telah menjadi ideologi dan falsafah kehidupan masyarakat (Priatna & Supandi, 2024). Dengan kata lain demokrasi pancasila diartikan sebagai sistem demokrasi yang berpegang pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pancasila dengan menggunakan hukum untuk mengatur negara yang berdemokrasi. Aturan hukum yang dibuat dalam mengatur negara harus sesuai dan juga sejalan dengan tujuan serta pandangan hidup bangsa sehingga sistem demokrasi yang baik dan sesuai dengan konteks demokrasi itu sendiri dapat terselenggarakan dengan sebagaimana mestinya. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pengertian pancasila sebagai dasar negara, selain itu pancasila sebagai organisasi kehidupan berbangsa mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari tokoh-tokoh bangsa.

Dalam konteks demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat merupakan landasan terpenting yang ditegakkan. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik ada di tangan rakyat dan mereka berhak menentukan pilihan pemimpinnya melalui mekanisme hak pilih universal yang demokratis. Demokrasi mempunyai karakter yang mencakup semua karena diterima di berbagai negara di dunia dan setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas demokrasi suatu negara biasanya dipengaruhi oleh ideologi yang dipilihnya. Demokrasi kita tidak hanya inklusif, tetapi juga memiliki karakter unik yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi sebagai warisan budayanya, maka kehidupan demokrasi yang kita jalani harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan landasan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bambang Trisno, *et al*, 2024).

Demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan aturan hukum. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah cara utama untuk mengekspresikan preferensi politik dan menentukan perwakilan publik. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup konsep demokrasi yang unik dan memiliki urgensi tersendiri. Menurut Ayu Putri (2024) Berikut adalah konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila:

1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan di dasari oleh hikmat kebijaksanaan.



2. Musyawarah untuk mufakat: Prinsip musyawarah dalam Pancasila menggaris bawahi pentingnya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan konsultasi, yang merupakan inti dari demokrasi konsensual.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Demokrasi dalam Pancasila harus berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat dan menjamin keadilan sosial. Urgensi Demokrasi dalam Pancasila.
4. Partisipasi Rakyat: Konsep demokrasi dalam Pancasila memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam proses pembuatan keputusan, sehingga memperkuat hak dan tanggung jawab warga negara.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Demokrasi yang bersumber dari Pancasila memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama.
6. Mencegah Oligarki: Pancasila mendorong keterlibatan lebih banyak orang dalam politik, sehingga mencegah konsentrasi kekuasaan dalam tangan segelintir individu atau kelompok (oligarki).
7. Keseimbangan antara Kebebasan dan Keadilan: Demokrasi dalam Pancasila mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial, sehingga menghindari penyalahgunaan kebebasan yang merugikan masyarakat.
8. Pembangunan yang Berkelanjutan: Demokrasi yang berakar dalam Pancasila dapat mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, mengingat masyarakat memiliki peran dalam pemilihan pemimpin dan perencanaan pembangunan

Unsur utama dalam sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah asas musyawarah. Asal usul sila ini berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Prinsip ini secara inheren mencakup konsep “win-win solution”. Artinya kerja sama yang menguntungkan semua pihak melalui penentuan nasib bersama, meskipun masing-masing pihak berbeda pendapat. Dalam konteks ini, konsep demokrasi deliberatif versi Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu bentuk teori demokrasi konsensus. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila dapat digambarkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya dengan menjunjung tinggi dan mengikuti nilai-nilai inti Pancasila (Mudrikah Afra, *et al*, 2024).

Untuk mempertahankan identitas bangsa Indonesia dalam era transformasi digital yang terus berkembang, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama. Meskipun teknologi menawarkan banyak keuntungan, seperti memudahkan akses ke informasi, masyarakat masih menghadapi masalah dalam memilih informasi yang benar. Mereka juga menghadapi risiko penyimpangan dan perubahan budaya yang berbahaya akibat pengaruh transformasi digital dan teknologi (Syahputra¹ *et al.*, 2023). Sebagai negara yang mengusung prinsip demokrasi, Indonesia mengakui pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan, masyarakat Indonesia dituntut untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut guna mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab (Cahyati *et al.*, 2024).

Pendidikan Pancasila juga sangat penting untuk membangun nilai-nilai moral generasi muda. Dalam hal ini, moralitas mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku terhadap sesama manusia. Sementara itu, etika mengacu pada



standar yang mengatur bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungan dan sesama manusia (Furnamasari et al., 2024), Pendidikan Pancasila adalah ideologi dan sistem pendidikan nasional Indonesia yang mengandung rasa jati diri dan moralitas yang kuat dalam ajarannya. Pancasila harus menjadi alat untuk menghadapi tantangan yang muncul di era komputer dan internet saat ini. Saat ini, kemajuan teknologi semakin tidak sesuai dengan sifat manusia. Untuk mempertahankan tradisi dan eksistensi bangsa di era teknologi saat ini, Pancasila sangat penting. Karena hal-hal ini, kemajuan teknologi, meskipun memiliki beberapa kelemahan, dapat membantu generasi muda. Generasi muda harus mampu membedakan dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi, serta meminimalkan penggunaan teknologi dan menggunakannya sesuai kebutuhan. manfaatnya termasuk meningkatkan hubungan internasional dan daya tanggap (Dewi, 2024).

KESIMPULAN

Dalam menghadapi era digital, penting bagi bangsa Indonesia untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam membangun demokrasi yang berkeadilan dan inklusif. Peran media sosial dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat diakui, tetapi juga membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan polarisasi sosial yang dapat merusak integritas demokrasi. Pancasila, dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan utama untuk menjaga harmoni bangsa di tengah perubahan global. Generasi muda diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan literasi digital, dan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila melalui partisipasi aktif, pemanfaatan teknologi secara bijaksana, dan upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya keadilan sosial dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, D. (2024). Implementation of Pancasila in the Digital Era. *Jurnal Setia Pancasila*, 4(2), 49-58.
- Ayu Putri Nabila, d. (2024). Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 134-142.
- Bambang Trisno, d. (2024). Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 3(14), 195-208.
- Cahyati, S. d. (2024). Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 687-693.
- Furnamasari, Y. d. (2024). Pendidikan Pancasila di Era Digital: Mengatasi Tantangan Moralitas dan Etika. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 2719-2727.
- Mudrikah Afra, d. (2024). Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 290-303.
- Priatna, I. &. (2024). Tantangan dan Peluang Karir di Era Digital. *SEPAKAT: Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 7-11.
- Ramadhani, A. B. (2024). Transformasi Pancasila Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 153-157.



Syahputra A, d. (2023). Penerapan Pancasila Di Era Digital. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 816-827.